

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN PAGENTAN TRIWULAN I TAHUN 2025

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2025 KECAMATAN PAGENTAN

Triwulan : I

	Indikator	Casaman	Indikator	K	inerja		Indikator	Ki	nerja		Indikator	K	inerja		Indikator Sub	Ki	nerja		Anggaran	
No	RPJMD	Sasaran Strategis	Kinerja	Target	Realisasi %	Program	Program	Target	Realisasi %	Kegiatan	Kegiatan	Target	Realisasi %	Sub Kegiatan	Kegiatan	Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
1	NILAI SAKIP	Meningkatny a Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah untuk Urusan Kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (72,10)		Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan kelurahan	persentase terlaksanany a program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	0	25	koordinasi kegiatan pemberdayaa n desa	Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana	0	50	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	1	0	0	0
										Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakat an tingkat kecamatan	0	0	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0,00
						Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang terlaksana	25	25	Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Persentase Penyelenggara an Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	25	25	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	1.600.000	1.600.000	100,00
						dan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa yang terlaksana	35	35	Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	35	35	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	16	0	0	0,00
														Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	4	0	0	0,00

							Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa		3	0	0	0,00
							Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0,00
							Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	1.000.000	1.000.000	100,00
							Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	4	0	0	
							Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0	0	0,00

2	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatny a Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Kepuasan Masyarakat	85,90	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintaha n daerah kabupaten/k ota yang terlaksana	46	25	n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	64	64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	0	0	0,00
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	0	0	0,00
									Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	24	24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	10	450.000.000	403.446.584	89,65
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	3	3	6.090.000	4.965.000	81,53
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD	4	4	0	0	0,00
									Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	8.519.900	0	0,00

									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	16.000.000	14.524.300	0,00
					Urusan Pemerintaha n Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang	100	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	17.984.000	0	0,00
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0	16.218.000	0	0,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	1.200.000	957.923	79,83
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3	3	20.000.000	19.168.724	95,84
					n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	38	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	1	5.750.000	4.125.000	0,00
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	0	271.797.900	0	0,00
									Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3	0	0	0	0,00

	Program Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Publik	Koordinasi Pemeliharaa n Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaran ya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	33	Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	2	3	0	0	0,00
		Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	17	Pemerintahan yang terkait	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	40	42	0	0	0,00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3	3	900.000	900.000	100,00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	0	0	1.900.000	1.900.000	0,00
JUMLAH TOTAL		-							818.959.800	452.587.531	55,26

Kanjarnegara 8 April 2025 CAMAT, PAGENTAN

PECAMATAN PAGE Pending TI.II NIP.1969/14.81408031004

PEME

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 KECAMATAN PAGENTAN

Triwulan: I

					REAL	LISASI		REALISASI			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	I	П	III	IV	S/D TRIWULAN INI	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (72,10)	0		-	-	0	0	Kondisi geografis yang rawan bencana, masih kurangnya komunikasi baik internal opd maupun lintas sektoral.	Menjalin kerjasama dengan stakeholders terkait (Forkompinca, Desa, FPRB, Ormas), membangun Komunikasi yang baik dalam internal OPD. Membuat Rencana aksi untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan di evaluasi tiap triwulan.
2		Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85,90	0	-	-	-	0	0	Kendala jaringan internet, Kondisi geografis yang rawan bencana, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP Pelayanan.	menjalin kerjasama dengan stakeholders terkait (Dindukcapil, Forkompinca, Desa, FPRB, Ormas), Sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat terkait pelayanan melalui media sosial maupun media cetak seperti banner.

Banjamegara, 8 April 2025

CAMAI PAGENTAN

HARI ARUME NVKO, SP, M.Si NIP. 19690 181990031004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 KECAMATAN PAGENTAN

Triwulan : I

					REAL	ISASI		REALISASI			
No	Program	Indikator Kinerja	TARGET	I	II	Ш	IV	S/D TRIWULAN INI	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase terlaksanany a program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	25	-	-	-	25	25	Kondisi geografis yang rawan bencana, Kurangnya komunikasi yang efektif antar stakeholders	Menjalin kerjasama baik dalam internal OPD sdan stakeholders lintas sektoral
2	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum yang terlaksana	100	25	-	-	-	25	25	Kondisi geografis yang rawan bencana, Kurangnya komunikasi yang efektif antar stakeholders	Menjalin kerjasama baik dalam internal OPD sdan stakeholders lintas sektoral
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa yang terlaksana	100	35	-	-	-	35	35	Kondisi geografis yang rawan bencana, tingkat kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang masih terbatas.	Komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan desa.

4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintaha n daerah kabupaten/k ota yang terlaksana	100	25		-	-	25	25	Adanya migrasi Katalog Versi 5 ke Versi 6 dalam Proses pengadaan barang dan jasa sehingga memerlukan proses adaptasi, dan belum tersedianya penyedia dalam etalase yang dibutuhkan. Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 900.1.1/4/BUPATI/2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Transfer Ke Daerah	Terus memantau proses pengadaan barang dan jasa dengan aktif berkomunikasi dengan Stakeholder terkait (UPPBJ). Menunggu adanya kebijakan terkait proses pengadaan belanja modal.
5	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	100	25	-	-	-	25	25	Kendala jaringan internet, Kondisi geografis yang rawan bencana, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP Pelayanan.	Berusaha mewujudkan pelayanan prima, menetapkan SOP Pelayanan, Sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat terkait pelayanan melalui media sosial maupun media cetak seperti banner.

Banjarnegara, 8 April 2025 CAMAT PA GENTAN CAMAT PAGENTAN

CAMAT PAGENTAN

PARI ARUMB WUKO, SP,M.Si

Pembra Tk.

NIP, A196901181996031004

PEME

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 KECAMATAN PAGENTAN

Triwulan : I

					REALI	SASI		REALISASI			
No	Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	I	П	III	IV	S/D TRIWULAN INI	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana	100	50				50		Koordinasi yang terhambat karena kondisi geograifs	Menjalin Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan desa
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100	0				0		Koordinasi yang terhambat karena kondisi geografis	Menjalin Koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral dan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	100	25				25	25	Koordinasi dan komunikasi yang terhambat.	Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam forkompinca.
4	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	35				35	35	beberapa desa yang kurang responsif dalam menerima informasi.	Menjalin koordinasi yang baik dengan desa, Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap desa dalam pelaksanaan kegiatan. Mendorong aparatur desa/perangkat desa untuk mengembangkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan baik dilaksanakan secara mandiri maupun dari dinas.

5	Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	64		64	64	Evaluasi kinerja belum dilaksanakan dengan maksimal melalui teknologi informasi	Rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan di tiap akhir triwulan, pengoptimalan penggunaan aplikasi,menambah kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan jika ada.
6	Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	100	24		24		Adanya perubahan-perubahan aplikasi yang membutuhkan beberepa waktu untuk beradaptasi.	Berkoordinasi dengan dinas terkait terkait penerapan aplikasi.
7		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	20		20		Proses pengadaan barang dan jasa melalui proses e-purchasing, terkait penggunaan aplikasi e-katalog perubahan versi 5 menjadi versi 6, membutuhkan proses adaptasi.	berkoordinasi aktif dengan stakeholder terkait berkaitan dengan persiapan akun e-katalog yang bermigrasi dari versi 5 ke versi 6.
8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	0		0		Adanya migrasi e-katalog dari versi 5 ke versi 6, dan adanya Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 900.1.1/4/BUPATI/2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Transfer Ke Daerah	Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang dan konsultasi mengenai tata cara proses pengadaan barang dan jasa melalui proses epurchasing dan persiapan penyesuaian penginputan kode RUP pada aplikasi SIRUP, menunggu kebijakan baru.
9	Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	25		25	25	Tagihan listrik yang tidak tetap setiap bulan sehingga memnungkinkan terjadinya silpa atau kekurangan anggaran.	Menghitung rata-rata pemakaian tahun lalu sebagai acuan dalam penetapan anggaran.

10	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	100	10	10 1	0 kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah seperti kendaraaan dan sarana dan prasarana gedung kantor, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan.	Menganalisis kembali kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi yang ada.
11	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100	50	50 5	Koordinasi yang terhambat karena kondisi geograifs	Menjalin Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para stakeholders
12	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		17	17 1	Masih kurangnya Kesadaran masyarakat untuk melunasi PBB di awal waktu dan lebih cepat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP Pelayanan	Sosialisasi kepada desa untuk melaksanakan pelunasan PBB epat waktu, Monitoring pelaksanaan pemungutan PBB, Sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat terkait pelayanan melalui media sosial maupun media cetak seperti banner.

'atatan :

ılisasi ada analisis ketercapaian

1 kendala dalam pencapaian

Banjamegara, 8 April 2025

Banjamegara, 8 April 2025

KECAMATAN

CAMATPAGENTAN

PAGENTAN

HARI ARUME

NIP. 196901181996031004

KECAMATAN PAGENTAN

Triwulan : I

					REAL	ISASI		REALISASI			
No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	I	II	Ш	IV	S/D TRIWULAN INI	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	2	1				1	50	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan stakeholder diatas atau terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat maju atau mundur dari rencana aksi	selalu memantau dan menyesuaikan dengan peraturan baru dan koordinasi dengan stakeholders
1	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	0				0	0	Pelaksanaan kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan III, untuk triwulan 1 dalam tahap proses pencapaian target melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakan.	Pelaksanaan kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan III, untuk triwulan 1 dalam tahap proses pencapaian target melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakan.
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	1				1	25	Koordinasi yang terhambat karena kondisi geografis	Menjalin Koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral dan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.

3	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32	16		16	50	Koordinasi yang terhambat karena kondisi geografis	aktif monitoring dan membina desa
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	4		4	25	Tingkat Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa yang berbeda-beda antar desa	aktif monitoring dan membina desa, mendorong desa untuk meningkatkan kemampuan SDM
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17	3		3	17,65	Tingkat Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa yang berbeda-beda, beberapa desa kurang responsif dalam menerima dan mengolah informasi.	aktif monitoring dan membina desa
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0		0	0	ditunda sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentanf perubahan kedua atas UU nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa	ditunda sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentanf perubahan kedua atas UU nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa
7	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi Pembangunan	1	1		1	100	terlaksana dengan baik	terlaksana dengan baik.
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16	4		4	25	Koordinasi yang terhambat karena kondisi geografis	Menjalin Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan desa
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	16	0		0	0	Koordinasi yang terhambat karena kondisi geografis	Menjalin Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan desa

9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	7		7	87,5	terlaksana dengan baik	terlaksana dengan baik.
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar SKPD	5	2		2	40	Evaluasi kinerja belum dilaksanakan dengan maksimal melalui teknologi informasi	akhir triwulan, pengoptimalan penggunaan aplikasi,menambah kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan jika ada.
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	10		10	76,92	Beberapa ASN mutasi keluar ke OPD lain dan belum ada mutasi masuk.	Penyesuaian kembali target dan rencana keuangan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait
	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	keuangan SKPD	12	3		3	25	Aplikasi eror	koordinasi dengan stakeholders terkait.
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	4		4	28,57	terlaksana dengan baik	terlaksana dengan baik.

14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	0		0	0	Proses pengadaan barang dan jasa melalui proses e- purchasing, terkait penggunaan aplikasi e-katalog perubahan versi 5 menjadi versi 6, membutuhkan proses adaptasi.	berkoordinasi aktif dengan stakeholder terkait berkaitan dengan persiapan akun e-katalog yang bermigrasi dari versi 5 ke versi 6.
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Terpenuhi	7	2		2	28,57	Proses pengadaan barang dan jasa melalui proses e- purchasing, terkait penggunaan aplikasi e-katalog perubahan versi 5 menjadi versi 6, membutuhkan proses adaptasi.	berkoordinasi aktif dengan stakeholder terkait berkaitan dengan persiapan akun e-katalog yang bermigrasi dari versi 5 ke versi 6.
16	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0		0	0	Adanya migrasi e-katalog dari versi 5 ke versi 6, dan adanya Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 900.1.1/4/BUPATI/2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Transfer Ke Daerah	Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang dan konsultasi mengenai tata cara proses pengadaan barang dan jasa melalui proses e- purchasing dan persiapan penyesuaian penginputan kode RUP pada aplikasi SIRUP, menunggu

17	dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan	Jumlah paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	4	0		0	0	Adanya migrasi e-katalog dari versi 5 ke versi 6, dan adanya Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 900.1.1/4/BUPATI/2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Transfer Ke Daerah	Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang, dan konsultasi mengenai tata cara proses pengadaan barang dan jasa melalui proses e- purchasing dan persiapan penyesuaian penginputan kode RUP pada aplikasi SIRUP, menunggu kebijakan baru.
18	Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3		3	25	terlaksana dengan baik	Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara
	Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3		3	25	terlaksana dengan baik	Selalu berpedoman pada rencana aksi
20			9	1		1	11,11	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan.	selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan.

21	Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0		0		adanya Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 900.1.1/4/BUPATI/2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Transfer Ke Daerah	Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang, dan konsultasi mengenai tata cara proses pengadaan barang dan jasa melalui proses e- purchasing dan persiapan penyesuaian penginputan kode RUP pada aplikasi SIRUP, menunggu kebijakan atau disposisi dari stakeholder terkait
22	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	12	0		0	0	kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	koordinasi mengenai kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan.
23	Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6	3		3	50	Koordinasi yang terhambat karena kondisi geografis	Menjalin Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan para stakeholder
24		Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	150	42		42	28	Tingkat permintaan terhadap dokumen pelayanan perizinan non usaha (dispensasi nikah dan perizinan pernikahan dibawah umur yang tinggi)	Sosialisasi kepada desa (masyarakat) tentang pernikahan bekerjasama dengan stakeholder terkait.

25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	3		3	25	Jaringan Internet kurang lancar	Koordinasi dengan stakeholders terkait, mengenai kendala jaringan internet.
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1	0		0	0	Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Pada triwulan I pelaksanaan kegiatan pada tahap sosialisasi dan pembagian SPPT.	Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait pelunasan PBB lebih awal dan cepat.
								Banjarnegara, 8 Banjarnegara, 8 Banjarnegara, 8 BANJAROMATIJAR	711, 51,111.51

ANNIP. 196901181996031004